

**KEPEMIMPINAN KEPALA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN PALLEKO
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

MUH. RIZAL ALFARUQHI ROZADIN

Nomor Stambuk : 105640 1232 11

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : Kepemimpinan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Muh. Rizal Alfaruqi Rozadin

Nomor Stambuk : 105640 1232 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

rs. H. Ansyarai Mone, M.Si

Pembimbing II

Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Mengetahui:

Dekan



Dr. H. Ihsani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, M.Si

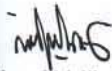
PENERIMAAN TIM

telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Makassar yang berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis, 30 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENGUJI

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si
2. Drs. H. Ansyarai Mone, M.Si
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Rizal Alfaruqhi Rozadin

Nomor Stambuk : 105640 1232 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Takalar, 30 Agustus 2018
Penyusun



Muh. Rizal Alfaruqhi Rozadin

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang menentukan setiap makhlukNya dan memberikan bimbinganNya. Dengan segala nikmat dan kesempatan yang tercurahkan sehingga menjadi sempurnalah segala amal saleh yang kita lakukan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul dan imam dari orang-orang yang bertaqwa, karena dengan perjuangannya kita bisa mengenal agama yang sempurna, mulia dan penuh cahaya ini, yakni Agama Islam. Dengan segala waktu dan kesehatan yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan menuliskan hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah, yaitu Skripsi yang berjudul “***Kepemimpinan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.***” Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan hambatan yang datang silih berganti. Namun, berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga semua rintangan dan hambatan dapat diatasi sampai selesai penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis secara khusus menyampaikan terima kasih yang tak berhingga kepada yang terhormat Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam kandungan sampai sekarang ini. Atas segala didikan, tenaga,

materi, kasih sayang yang berlimpah dan doa restunya serta ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Ansyarai Mone, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih juga kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Suluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan atas ilmu serta nasehat-nasehatnya.
5. Sahabat-sahabatku angkatan 2011 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan, yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita dan kesuksesan serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Lurah Palleko, beserta Staf Kantor dan juga Tokoh Masyarakat seperti Ketua RT/RW terima kasih telah memberikan kemudahan dalam mencari data yang dibutuhkan.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun karna penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Takalar, 30 Agustus 2018

Muh Rizal Alfaruqhi Rozadin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kepemimpinan.....	9
B. Konsep Partisipasi.....	24
C. Kerangka Pikir	38
D. Fokus Penelitian.....	39
E. Deskripsi Fokus Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Informan Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	44
G. Keabsahan Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 48
- B. Kepemimpinan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 61
- C. Kendala dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ... 74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 78
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

**KEPEMIMPINAN KEPALA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN PALLEKO
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR**

¹⁾Muh. Rizal Alfaruqhi ²⁾Drs. H. Ansyarai Mone, M.Si ³⁾Dr. Amir Muhiddin, M.Si

*105640123211, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Makassar*

ABSTRAK

Dewasa ini kita telah mengetahui berbagai macam karakteristik pemimpin dengan berbagai macam pula manajemen yang diperankan. Tentunya figur seorang pemimpin yang selalu membela keperluan rakyatlah yang kita harapkan. Sebagai bangsa yang mayoritas dengan keberagaman agama, budaya, suku, dan ras kemudian melahirkan bermacam pemikiran pola tingkah laku dan sifat, sebagai pemimpin harus dapat menselaraskan keberagaman ini sehingga tidak ada yang merasa dikucilkan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Kelurahan dan Faktor Apa yang Menghambat dan Mendukung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakatnya.

Berlandaskan pada Teori Hersey dan Blanchard dalam Silambi (2014:728) yang mengemukakan Gaya Dasar Kepemimpinan. Pengumpulan data melalui wawancara dengan 10 orang Informan.

Hasil diperoleh kesimpulan bahwa benar Kepala Kelurahan sudah bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Ini dilakukan dengan cara memberikan instruksi-instruksi kepada masyarakat seperti bagaimana mekanisme di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan dalam hal pembangunan, Kepala Kelurahan juga sudah berupaya untuk mengarahkan dan memotivasi masyarakat secara menyeluruh, Mengikutsertakan masyarakat dalam hal pembangunan melalui komunikasi yang baik

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kelurahan, Partisipasi, Masyarakat, Silambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Hidup dalam kelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis anggota kelompok haruslah saling menghormati & menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan & menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik, kehidupan sosial manusiapun perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berjiwa pemimpin, paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri.

Pemimpin mempunyai kedudukan paling penting dalam sebuah komunitas, kelompok masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak akan aman, maju, terarah jika tidak adanya seorang pemimpin maka kata kunci keberhasilan suatu bangsa dan negara adalah terletak pada seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu memberi rasa aman, tenteram dan mampu mewujudkan cita-cita rakyatnya adalah sosok pemimpin yang berhasil dalam kepemimpinannya, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya,

bangsanya, dan pemikirannya dipakai meskipun pemimpin itu tidak lagi bersama mereka.

Dewasa ini kita telah mengetahui berbagai macam karakteristik pemimpin dengan berbagai macam pula manajemen yang diperankan. Sebagai pemimpin yang ideal tanpa memiliki rasa kepentingan bersifat mementingkan sebagian pihak, tentunya figur seorang pemimpin yang selalu membela keperluan rakyatlah yang kita harapkan. Sebagai bangsa yang mayoritas dengan keberagaman agama, budaya, suku, dan ras kemudian melahirkan bermacam pemikiran pola tingkah laku dan sifat, sebagai pemimpin harus dapat menselaraskan keberagaman ini sehingga tidak ada yang merasa dikucilkan. Inilah salah satu tantangan yang berada dalam kondisi serba modernisasi.

Pada saat ini telah banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan sehingga masyarakat telah diintimidasi oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab, segala persoalan yang dihadapi oleh kebanyakan bangsa dan negara adalah tentang masalah pemimpin, masih terlekat di memori kita kejadian pada tahun 1998, dimana saat itu kepemimpinan Soeharto diturunkan secara paksa oleh para masyarakat dan mahasiswa. Hal ini tentunya tidak akan terulang lagi jika kita memiliki pemimpin yang pro rakyat, maka perlu adanya suatu pemahaman yang konkrit untuk mendapatkan sosok pemimpin yang diharapkan oleh rakyat.

Pemimpin sekarang telah banyak menyalahgunakan kekuasaan sehingga terjadi penyimpangan secara terorganisir dan menimbulkan pertanyaan besar bagi

penerus bangsa dan negara, dengan demikian maka akan timbul banyak sekali asumsi tentang mengapa dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap rezim kekuasaan saat ini. Segala bentuk permasalahan yang sering terjadi terhadap pemikiran masyarakat adalah kurangnya pemahaman tentang dasar-dasar untuk memilih seorang pemimpin.

Salah satu contoh yang dapat kita jadikan sari tauladan adalah sosok pemimpin seperti Rasulullah. Tentunya kita mengharapkan sifat kepemimpinan Rasulullah yang menjadi pemimpin kita baik untuk memimpin diri sendiri maupun memimpin sebuah komunitas bahkan suatu negara. Walaupun pada zaman yang serba modern ini sangat sedikit pemimpin yang mendekati sosok kepemimpinan Rasulullah, setidaknya kita menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar mampu untuk menjadi seorang pemimpin, karena disadari atau tidak pemimpin menjadi tolak ukur seberapa besar kemakmuran yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Sesuai dengan Nomor 73 Tahun 2005, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. Pembentukan Kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Bagian Wilayah Kerja
4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Lurah diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas itu, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
2. Pemberdayaan masyarakat,
3. Pelayanan masyarakat,
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan, Lurah dibantu perangkat kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi Seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keuangan Kelurahan bersumber dari :

1. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya,
2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga.

Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan, dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dari pemahaman terhadap ruang lingkup kelurahan, maka elemen utama dari suatu kelurahan terdiri dari :

1. Kesatuan wilayah administratif dengan segenap potensi sumber daya yang dimiliki,
2. Penduduk sebagai warga masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat,
3. Pemerintahan desa dan kelurahan,
4. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri,
5. Seperangkat aturan, tradisi dan kebiasaan yang dijunjung bersama untuk mencapai tujuan bersama. Elemen utama tersebut selanjutnya sebagai fokus dan lokus pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan masyarakat. Pengembangan kebijakan dan program pembangunan masyarakat desa tersebut dilakukan oleh suatu organisasi yang berkedudukan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta kecamatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang sebagaimana di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar?

2. Faktor apa yang Menghambat dan Mendukung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang Menghambat dan Mendukung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap melalui hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai rujukan bagi dunia perguruan tinggi khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan guna untuk mengembangkan lebih luas dan lebih mendalam tentang Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kelurahan khususnya di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan

partisipatif dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para pemimpin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

- b. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menjadi perluasan pengetahuan dan pemahaman mengenai Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat khususnya di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kata “Pemimpin” berasal dari kata asing yaitu *leader* dan “Kepemimpinan” yaitu *leadership*. John C Maxwell dalam Sentot Imam Wahjono (2010:266) mengatakan bahwa Kepemimpinan adalah pengaruh dan kemampuan untuk memperoleh pengikut serta menjadi seseorang yang diikuti orang lain dengan senang hati dan penuh keyakinan. Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarahnya manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan dari pada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia tersebut dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu.

Menurut Anggora dalam Harbani Pasolong (2008:5) mengemukakan bahwa Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pemimpin itu. Menurut Reinhard Zielgeler dalam Sentot Imam Wahjono (2010:266) mengatakan bahwa Pemimpin harus mampu memberdayakan setiap anggota yang dipimpinya sehingga mengerti tentang tujuan yang diinginkan perusahaan. Cara yang diperlukan untuk bisa

mewujudkannya adalah dengan selalu melibatkan partisipasi aktif dari setiap anggota dengan mewujudkan pertanyaan yang mengacu pada model pendekatan yang manusiawi. Sedangkan menurut G. U. Cleeton dan C. W. Mason dalam Staf'i (2006:2) menjelaskan bahwa Kepemimpinan menunjukkan pada kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melebihi himbauan emosional.

Lebih jauh Walters dalam Tjihardi (2012:09) menyatakan bahwa Kepemimpinan berarti turut melibatkan orang lain dan lebih mengutamakan visi di atas segalanya pada pelaksanaannya. Walters menambahkan Kepemimpinan merupakan suatu seni tersendiri yang dipelajari dan diterapkan dengan hati-hati. Kepemimpinan bersifat dinamis dan situasional. Artinya tidak ada satu cara terbaik yang dapat digunakan untuk segala situasi yang dihadapi. Maka dari berbagai defenisi di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa Kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang pokok dalam suatu organisasi. Kualitas seorang pemimpin sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Seorang pemimpin mempengaruhi orang lain dan menunjukkan jalan serta berperilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama.

Menurut Young dalam Kartono (2003:10), Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pemimpin pada hakikatnya merupakan seorang yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang lain sekaligus mampu mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemimpin kepala Kelurahan harus memiliki kemampuan memimpin secara profesional dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang menurutnya dipandang efektif dalam pengelolaan organisasi atau unit kerja yang dipimpinnya.

Teori Kepemimpinan adalah sifat-sifat, tugas-tugas pokok, fungsi serta etika profesi yang perlu dipakai oleh pemimpin. G.R. Terry dalam Kartono (2011:72-80) mengemukakan sejumlah Teori Kepemimpinan yaitu:

1. Teori Otokrasi

Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-perintah, paksaan dan tindakan-tindakan yang arbitrer (sebagai wasit). Ia melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas.

2. Teori Psikologis

Teori ini menyatakan bahwa fungsi seorang pemimpin memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi untuk kesediaan bekerja dari para pengikut atau anggota. Jadi pemimpin yang mampu memotivasi orang lain akan sangat mementingkan aspek-aspek psikis manusia seperti pengakuan, martabat, status sosial, kebutuhan anggota dan lain-lain.

3. Teori Sosiologis

Kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikutnya agar tercapai kerja sama yang baik. Pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dengan menyertakan para pengikutnya dalam pengambilan keputusan terakhir. Pemimpin diharapkan dapat mengambil tindakan-tindakan korektif apabila terdapat kepincangan-kepincangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi.

4. Teori Suportif

Menurut teori ini, para pengikut harus berusaha sekuat mungkin dan bekerja sepenuh gairah, sedangkan pemimpin akan membimbing dengan sebaik-baiknya melalui *policy* tertentu. Untuk maksud ini pemimpin perlu menciptakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan yang bisa membantu mempertebal keinginan setiap pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, sanggup bekerja sama dengan pengikutnya, mau mengembangkan bakat dan keterampilannya serta menyadari benar keinginan sendiri untuk maju.

5. Teori Kelakuan Pribadi

Kepemimpinan ini akan muncul berdasarkan kualitas-kualitas atau pola-pola kelakuan para pemimpinnya. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama yaitu ia tidak melakukan tindakan-tindakan identik sama dalam setiap situasi yang dihadapi.

6. Teori Situasi

Teori ini menjelaskan, bahwa harus terdapat daya lenting yang tinggi pada pimpinan untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan situasi, lingkungan sekitar dan zamannya. Faktor lingkungan itu harus dijadikan tantangan untuk diatasi.

7. Teori Humanistik

Fungsi kepemimpinan menurut teori ini ialah merealisasi kebebasan manusia dan memenuhi segenap kebutuhan insan yang dicapai melalui interaksi pemimpin dengan rakyat.

Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard dalam Sentot Imam Wahjono (2010:285) menguraikan faktor perilaku yang mempengaruhi Gaya Kepemimpinan yang paling efektif tergantung kesesuaian di antaranya adalah:

1. Perilaku Tugas adalah upaya pemimpin mengorganisir dan menetapkan peran anggota, menjelaskan kegiatan setiap anggota, kapan dimana, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dicitrakan dengan upaya untuk menetapkan struktur organisasi, saluran komunikasi serta prosedur penyelesaian masalah secara jelas dan rinci.
2. Perilaku Hubungan adalah upaya pemimpin dan anggota dengan membuka saluran komunikasi, menyediakan dukungan sosioemosional dan kemudahan perilaku.

Thoha (2005:49) mengemukakan bahwa Gaya Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi orang lain seperti ia lihat. Secara garis besar,

Kepemimpinan itu sendiri adalah Gaya dari Kepemimpinan Demokratis dan Kepemimpinan Otokratis. Gaya Kepemimpinan Demokratis dikaitkan dengan kegiatan personal dan keikutsertaan para pengikutnya dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Salah satu teori yang menekankan suatu perubahan dan yang paling komprehensif berkaitan dengan kepemimpinan adalah Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional.

a. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan Transformasional, sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi anggota dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan kepemimpinan transformasional anggota akan merasa dipercaya, dihargai, loyal dan tanggap kepada pemimpinnya.

Kepemimpinan Transformasional adalah tipe pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka dan memiliki kemampuan mempengaruhi yang luar biasa. Aspek utama dari Kepemimpinan Transformasional adalah penekanan pada pembangunan motivasi pada anggota. Oleh karena itu, ada 3 cara seorang pemimpin Transformasional memotivasi anggotanya, yaitu dengan mendorong anggota untuk mendahulukan kepentingan kelompok serta meningkatkan kebutuhan anggota yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri.

b. Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan Transaksional adalah gaya kepemimpinan dimana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan anggota yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klarifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Kepemimpinan Transaksional dibentuk oleh faktor-faktor yang berupa Imbalan (*reward*), Manajemen Eksepsi Aktif (*active management by exception*) dan Manajemen Eksepsi Pasif (*passive management by exception*).

Menurut Heidjrachman dan S.Husnan (2002:224), Gaya Kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu pendapat lain menyebutkan Gaya Kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain dengan kekuatan posisi dan penggunaan otoritas.

Menurut Rivai (2011), Gaya Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa Gaya Kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.

Hersey dan Blanchard dalam Silambi (2014 : 728) yang mengemukakan bahwa Gaya Dasar dari Kepemimpinan, yakni; (1). Membimbing, gaya ini ditandai dengan komunikasi satu arah. Bersifat instruksi-instruksi yang mengarahkan bawahan secara ketat di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau

kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin lebih banyak membimbing bawahannya. (2). Mengarahkan, gaya ini ditandai dengan komunikasi dua arah dari pemimpin, yaitu memberikan pengarahan. Memberi atau membangun motivasi sehingga para anggota dapat mencurahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selain itu pemimpin juga memberikan sosio emosional agar bawahan turut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan. (3). Mengikutsertakan, gaya ini ditandai dengan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dalam pengambilan keputusan melalui komunikasi dua arah dan memberikan kemudahan untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas, yaitu menjalin komunikasi yang baik agar tercipta hubungan yang baik kepada para pengikutnya dan memberikan kemudahan akses informasi penting. Pemimpin selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam setiap aktivitas kerja. Dengan demikian memberikan partisipasi luas kepada masyarakat, maka motivasi masyarakat akan semakin berkembang dengan baik.

Menurut Rivai (2011:122) ada 3 macam Gaya Kepemimpinan yang mempengaruhi anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai yaitu:

1. Gaya kepemimpinan Otoriter

Gaya kepemimpinan ini menggunakan metode kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Sehingga kekuasaanlah yang paling diutamakan dalam organisasi. Pada Gaya Kepemimpinan ini, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Anggota hanya diberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan

untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. Sedangkan seorang pemimpinlah yang akan menentukan arah atau kebijakan untuk mencapai sasarnya.

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan ini anggota cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.

Menurut Robbins dan Coulter (2002), Gaya Kepemimpinan Demokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikutsertakan anggota dalam mengambil keputusan, mendelegasikan kekuasaan untuk mendorong partisipasi anggota dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai serta memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih anggota. Pada kepemimpinan demokratis anggota memiliki peranan yang lebih besar. Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai dan tentang cara mencapai sasaran tersebut anggotalah yang menentukan. Selain itu anggota diberi keleluasaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ciri-ciri kepemimpinan yang demokratis:

- a. Semua kebijakan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin.

- b. Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pemimpin menyarankan.
- c. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dari pembagian tujuan ditentukan oleh kelompok.
- d. Memiliki semangat dan loyalitas yang tinggi
- e. Mempunyai komitmen yang tinggi pada kegiatan pengembangan kemampuan anggota organisasi yang berpotensi pada bidangnya masing-masing
- f. Selalu berusaha dan mengembangkan serta menumbuhkan partisipasi anggota melalui kemampuannya memberikan motivasi.

3. Gaya Kepemimpinan Kendali Bebas

Gaya Kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada anggota. Struktur organisasi bersifat longgar dan pemimpin bersifat *pasif*. Peran utama pemimpin adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta anggotanya. Gaya kepemimpinan kendali bebas merupakan model kepemimpinan yang paling dinamis. Pada Gaya Kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran utama yang ingin dicapai saja. Sesuai dengan gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali menggunakan kekuasaannya atau sama sekali memberikan anggotanya keleluasaan untuk berbuat. Gaya Kepemimpinan Kendali Bebas bisa dikatakan tanpa kepemimpinan. Pemimpin melimpahkan sepenuhnya kepada anggota dalam menentukan tujuan. Peran pemimpin hanya

menyediakan keterangan yang diperlukan serta mengadakan hubungan dengan pihak luar.

2. Karakteristik Kepemimpinan.

Kepemimpinan mungkin hanya terbentuk dalam suatu lingkungan yang secara dinamis melibatkan hubungan diantara sejumlah orang. Konkritnya, seseorang hanya bisa mengklaim dirinya sebagai seorang pemimpin jika dia memiliki sejumlah pengikut. Selanjutnya antara pemimpin dan pengikutnya terjalin ikatan emosional dan rasional yang menyangkut kesamaan nilai yang disebar dan ditanam serta kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Walaupun dalam realitasnya sang pemimpinlah yang biasanya memperkenalkan atau bahkan merumuskan nilai dan tujuan. Dalam kepemimpinan ada beberapa unsur dan karakter yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Gibb dalam Salusu (2006:203). Ada 4 elemen dalam kepemimpinan yang paling berkaitan satu sama lain, yaitu pemimpin menampilkan kepribadian pemimpin, pengikut yang muncul dengan berbagai kebutuhannya, sikap serta masalah-masalahnya, situasi yang meliputi keadaan fisik dan tugas kelompok.

Selanjutnya Blake dan Mounton dalam Salusu (2006:204-205) menawarkan enam elemen-elemen yang dianggap dapat menggambarkan efektifnya suatu kepemimpinan. Tiga elemen pertama berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin menggerakkan pengaruhnya terhadap dunia luar yaitu, *initiative*, *inquiry* dan *advocacy*. Tiga elemen lainnya yaitu: *conflict solving*, *decision making*, dan *critique*. Berhubungan bagaimana memanfaatkan sumber

daya yang tersedia dalam organisasi untuk dapat mencapai hasil yang benar.

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. *Initiative* (Inisiatif), seorang pemimpin akan mengambil inisiatif apabila ia melakukan suatu aktivitas tertentu yang baru atau menghentikan sesuatu yang dikerjakan.
- b. *Inquiry* (Menyelidiki), pemimpin harus tahu betul mengenai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ia perlu mempelajari latar belakang dari suatu masalah, prosedur-prosedur yang harus ditempuh dan tentang orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan.
- c. *Motivate* (Mendorong), aspek memberi dorongan atau dukungan sangat penting bagi kepemimpinan seseorang karena sering timbul keraguan atau kesulitan mengambil keputusan diantara para eksekutif dalam organisasi atau karena adanya ide yang baik tetapi yang bersangkutan kurang mampu untuk mempertahankannya.
- d. *Conflict Solving* (Memecahkan Masalah), apabila timbul masalah atau konflik dalam organisasi, maka sudah menjadi kewajiban pemimpin untuk menyelesaikannya. Ia perlu mencari sumber dari konflik tersebut dan menyelesaikannya dengan musyawarah/mufakat.
- e. *Decision Making* (Pengambilan Keputusan), keputusan yang dibuat hendaknya keputusan yang baik, tidak mengecewakan dan tidak membuat frustrasi dalam artian keputusan yang dapat memberi keuntungan bagi banyak orang.

- f. *Critique* (Mengkritik), kritik disini sebagai proses mengevaluasi, menilai dan jika sesuatu yang telah diperbuat itu baik adanya maka tindakan serupa untuk masa-masa mendatang mungkin sebaiknya tetap dijalankan.

Ryaas Rasyid (2000:37) menjelaskan beberapa Karakter Kepemimpinan yang berbeda satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

1. Kepemimpinan yang Sensitif

Kepemimpinan ini ditandai dengan adanya kemampuan secara dini untuk memahami dinamika perkembangan masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan dan mengusahakan agar ia menjadi pihak yang pertama yang memberi perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Dalam Karakter Kepemimpinan ini, kemampuan berkomunikasi dari seorang pemimpin yang disertai pada penerapan transformasi di dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat bagi pemimpin dalam mengemban segala tugas-tugasnya.

2. Kepemimpinan yang Responsif

Dalam konteks ini, Pemimpin lebih aktif mengamati dinamika masyarakat dan secara kreatif berupaya memahami kebutuhan mereka. Jadi bisa dikatakan kepemimpinan yang responsif lebih banyak berperan menjawab aspirasi dan tuntutan dari masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media komunikasi. Menghayati adalah suatu sikap dasar untuk mendengar

suara rakyat, mau mengeluarkan energi dan menggunakan waktunya secara cepat untuk menjawab pertanyaan, menampung setiap keluhan, memperhatikan setiap tuntutan serta memanfaatkan setiap dukungan masyarakat tentang suatu kepentingan umum.

3. Kepemimpinan yang Defensif

Karakter Kepemimpinan ini ditandai dengan sikap yang egoistis, merasa paling benar, walaupun pada saat yang sama memiliki kemampuan argumentasi yang tinggi jikalau berhadapan dengan masyarakat. Komunikasi antara pemimpin dengan masyarakat cukup terpelihara, tetapi pada umumnya pemerintah selalu mengambil posisi sebagai pihak yang lebih benar dan lebih mengerti. Oleh karena itu, keputusan dan penilaiannya atas sesuatu isu lebih patut diikuti oleh masyarakat. Posisi masyarakat lemah, sekalipun tetap tersedia ruang bagi mereka untuk bertanya, menyampaikan keluhan, aspirasi dan lain sebagainya. Karakter kepemimpinan semacam ini bisa berhasil dalam jangka waktu tertentu. Tetapi ketika berhadapan dengan masyarakat yang semakin berkembang, baik secara sosial ekonomi maupun secara intelektualitas, karakter defensif ini akan sulit melakukan *manuver*.

4. Kepemimpinan yang Represif

Karakter Kepemimpinan ini cenderung sama egois dan arogannya dengan karakter kepemimpinan defensif, tetapi lebih buruk lagi karena tidak memiliki kemampuan argumentasi atau

justifikasi dalam mempertahankan keputusan atau penilaiannya terhadap suatu isu ketika berhadapan dengan masyarakat. Karakter kepemimpinan ini secara total selalu merupakan beban yang berat bagi masyarakat. Ia bukan saja tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah fundamental dalam masyarakat, tetapi bahkan cenderung merusak moralitas masyarakat. Singkatnya Kepemimpinan yang Represif lebih mewakili Sifat Diktatorial.

3. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi dalam menciptakan hubungan dengan bawahannya serta mempunyai pengaruh terhadap organisasi yang dia pimpin. Menurut Kartono (2003:81), Fungsi Kepemimpinan adalah memandu, menuntut, membimbing, membangun atau menggunakan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervise atau pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Masih dalam bukunya yang sama, Kartono (2003:102), mengurai fungsi kepemimpinan dalam kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi yang lancar dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas.
- b. Mensinkronkan ideologi,pikiran dan ambisi anggota-anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin.

- c. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh.
- d. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kepemimpinan, bakat dan produktifitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.
- e. Menegakkan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan kelompok, meminimalisir konflik dan perbedaan-perbedaan.
- f. Merumuskan nilai-nilai kelompok dan memilih tujuan kelompok sambil menentukan sarana dan cara operasional guna pencapaiannya.
- g. Mampu memenuhi harapan keinginan dan kebutuhan para anggota, sehingga mereka merasa puas, juga membantu adaptasi mereka terhadap tuntutan eksternal di tengah masyarakat dan memecahkan kesulitan-kesulitan hidup anggota kelompok setiap harinya.

B. Konsep Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Pengertian Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Partisipasi Masyarakat adalah hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Salim (2002:110) menjelaskan Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan, baik dengan penghimpunan atau menyumbangkan benda dan uang, pikiran atau ide maupun dengan tenaga atau gotong royong.

Adisasmita (2006:42) menjelaskan bahwa “Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan,

meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Dalam Perspektif Normatif, Partisipasi Masyarakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf d, menjelaskan bahwa Partisipasi Masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Pendapat Soetrisno (1995) menyatakan bahwa partisipasi dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan oleh pemerintah.
- b. Partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Tjokroamidjojo (1994:226:228) mengatakan bahwa ada 3 hal penting yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

- a. Masalah Kepemimpinan
- b. Komunikasi
- c. Pendidikan

2. Partisipasi Masyarakat

Tanpa adanya partisipasi yang baik dari masyarakat, maka program-program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Lebih jauh Sutrisno

(1995:222) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut defenisi ini, ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dalam tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Melihat hubungan di atas, maka akan terlihat bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan sangat dipengaruhi oleh Kepemimpinan Kepala Kelurahan. Untuk membutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi, maka dituntut kemampuan menggerakkan dan mengarahkan serta keterbukaan dari Kepala Kelurahan dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Oakley dalam Melvani (2011) memberi pemahaman mengenai konsep partisipasi dengan mengelompokkan partisipasi ke dalam 3 pengertian pokok yaitu Partisipasi sebagai Kontribusi, Partisipasi sebagai Organisasi dan Partisipasi sebagai Pemberdayaan. Dengan landasan teori yang dilakukan oleh Oakley, disusun Konsep Variabel Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan langsung anggota masyarakat meliputi kontribusi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan dimensi pengorganisasian masyarakat dan dimensi pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya Partisipasi merupakan perwujudan asas kekeluargaan yang telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu.

Istilah lain dari Partisipasi sering menjadi sinonim dari peran serta, keterlibatan dan keikutsertaan yang terwujud dalam sikap gotong-royong.

Masyarakat diberi harapan untuk dapat berperan aktif dalam proses politik, menentukan nasib ekonominya dan kelestarian budayanya. Diawali Regulasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Ekonomi Daerah yang dijadikan sebagai landasan yuridis untuk menggeser fokus politik kearah daerah dan Kelurahan. Melalui otonomi daerah ini diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif dan menumbuhkan kemandirian masyarakat.

Mubyarto dalam Ndaraha (1997:102) mendefinisikan Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi menimbulkan harapan diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang memyangkut masyarakat. Dengan kata lain, Partisipasi adalah bentuk memanusiakan manusia. Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintah, permasyarakatan dan pembangunan.

Merujuk dari pengertian di atas, Partisipasi Masyarakat meliputi keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan mengevaluasinya. Partisipasi juga berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kontrol atas sumbernya dan institusi regulasi dalam situasi sosial tertentu serta mengembangkan kemitraan berdasarkan dialog yang disusun secara bersama. Secara umum partisipasi dimaknai sebagai proses yang mempengaruhi membagi kontrol atas prakarsa pembangunan, keputusan dan sumber daya. Partisipasi melibatkan mental maupun emosional. Ini berarti seseorang

memberikan pikiran, perasaan dan aspek kejiwaan sehingga dapat menimbulkan tanggungjawab dalam dirinya. Dari pendapat di atas terlihat bahwa mereka menyoroti partisipasi dengan lebih menekankan pada aspek kejiwaan.

Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan dibangun oleh landasan nilai-nilai ideal sebagai berikut:

1. Unsur kesadaran yang lahir dari dalam diri masyarakat secara otentik untuk terlibat dalam politik dan pembangunan. Nilai inilah yang membedakan partisipasi dengan mobilisasi.
2. Penempatan diri masyarakat sebagai subjek kebijakan dan pembangunan.
3. Peran-peran aktif yang sifatnya dialogis sehingga menjamin kesetaraan antarmasyarakat.
4. Suasana kebersamaan antara masyarakat sebagai bentuk jalinan solidaritas. Dengan demikian, Partisipasi didekatkan dengan semangat kebersamaan dan tidak terbatas pada tingkat peran individual semata tetapi bersifat kolektif.
5. Pelembagaan dan keterlanjutan pembangunan.

Dari nilai-nilai di atas dapat kita pahami bahwa kesadaran yang lahir dalam diri seorang masyarakat merupakan modal yang kuat untuk proses pembangunan. Ini karena kesadaran yang timbul tanpa ada paksaan akan menumbuhkan kepercayaan diri yang menyulitkan seseorang untuk dipengaruhi atau dimobilisasi.

3. Bentuk Partisipasi

Bila dilihat dari bentuk dan tahapan partisipasi, maka tahapan partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Hoofsteede (1971: 25), dalam hal ini membagi partisipasi menjadi 3 tingkatan, antara lain :

- a. Partisipasi Inisiasi (*Inisiation Participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin (kelurahan), baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
- b. Partisipasi Legitimasi (*Legitimation Participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- c. Partisipasi Eksekusi (*Execution Participation*), adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Dari ketiga tahapan partisipasi di atas, partisipasi inisiasi mempunyai kadar yang lebih tinggi dibanding partisipasi legitimasi dan eksekusi. Di sini penduduk tidak hanya sekedar menjadi objek pembangunan saja, tetapi sudah dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan. Sedangkan kalau masyarakat ikut hanya dalam tahapan pembicaraan saja, seperti “rembug kelurahan”, padahal proyek yang akan dibangun sudah jelas wujudnya, maka masyarakat hanya berpartisipasi pada tingkat legitimasi saja. Sedangkan Partisipasi Eksekusi adalah yang terendah dari semua tingkatan partisipasi di atas. Masyarakat hanya turut serta dalam

pelaksanaan proyek, tanpa ikut serta menentukan dan membicarakan proyek tersebut.

Dilihat dari jenisnya, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat bermacam-macam sesuai dengan kemampuan, seperti tertera di bawah ini:

- a. Partisipasi buah pikiran, adalah jenis partisipasi yang diberikan seperti menyumbangkan buah pikiran, pengalaman, pengetahuan dalam pertemuan rapat.
- b. Partisipasi tenaga, adalah jenis partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan, seperti untuk perbaikan atau pembangunan (kelurahan), pertolongan untuk orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela.
- c. Partisipasi harta benda, partisipasi yang diberikan oleh seseorang dalam suatu kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan (kelurahan), pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemampuan, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial, adalah jenis partisipasi yang diberikan sebagai tanda keguyuban, seperti turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian) tabungan dan sebagainya. (Santoso Sastroputro, 1988: 44).

Sedangkan jenis partisipasi bila dilihat dari sifatnya adalah:

- a. Memberi input pada proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.

- b. Memberi input dan menikmati hasilnya.
- c. Memberi input, menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan.
- d. Menikmati hasil/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
- e. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.

Dalam pembangunan, setiap warga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini mengingat banyaknya jenis partisipasi yang dapat disumbangkan dalam pembangunan. Adapun wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan menurut Konkon Subrata dan Suyatna B. Atmaja (1982: 28) adalah:

- a. Buah pikiran dan moril (persetujuan, dukungan sosial);
- b. Tenaga fisik;
- c. Harta benda (material);
- d. Keterampilan/kemahiran;
- e. Sosial (koperasi, kondangan);
- f. Waktu; dan
- g. Mengambil keputusan.

Dari uraian tersebut, terlihat beberapa macam bentuk partisipasi yang bisa dijadikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Kelurahan dengan terlibat aktifnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maka pelaksanaan pembangunan akan

semakin mudah dijalankan. Begitupun sebaliknya, tanpa adanya partisipasi yang baik dari masyarakat, maka program-program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik.

Lebih jauh Sutrisno (1995:222) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencanaan dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan serta melestarikan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut defenisi ini, ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun diwilayah mereka. Melihat hubungan diatas, maka bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Kepala Kelurahan. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang baik, maka dituntut menggerakkan dan mengarahkan serta keterbukaan dari Kepala Kelurahan dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

a. Faktor Pendukung

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 1992 dalam Sumardjo dan Saharudin, 2003). Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan

manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, seperti psikologis individu (*needs*, harapan, motif, *reward*), pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung, structural dan stratifikasi sosial, budaya lokal serta peraturan dan pelayanan pemerintah.

Menurut Oppenheim (1973) dalam Sumardjo dan Saharudin (2003) ada unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu pada diri seseorang (*Person inner determinants*) dan terdapat iklan atau lingkungan (*Environmental factors*) yang memungkinkan terjadinya perilaku tersebut. Sedangkan, Menurut Sahidu (1998) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, *needs*, *rewards* dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.

Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

1. *Learning process (learning by doing)*; Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. *Institutional development*; Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau

pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial.

3. *Participatory*; Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat (Marzali, 2003 dalam Sahidu, 1998).

b. Faktor Penghambat

Hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Menurut Max Weber dan Zanden (1988), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan. Kelas (ekonomi) akan membedakan kelompok masyarakat satu dengan yang lain apabila ditinjau dari tingkat pendapatan dan kekayaan. Status bergantung pada keberadaan bagaimana seseorang dilihat atau dinilai. Sedangkan Kekuasaan menurut Thio (1989) adalah kemampuan seseorang untuk meminta orang lain melakukan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan olehnya, biasanya yang lebih banyak kekayaannya, maka akan lebih besar kekuasaan yang dimilikinya.

Stratifikasi masyarakat tersebut akan menyebabkan terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perilaku tolong-menolong yang menjadi jiwa partisipasi. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat terhadap pembangunan. Sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi untuk mensukseskan pembangunan demi kepentingan bersama.
- b. Tingkat kehadiran masyarakat. Masih rendahnya tingkat kehadiran saat musrembang atau forum rembung sehingga menghambat tercapainya tujuan pembangunan.
- c. Sosialisasi yang dianggap masih kurang sehingga masyarakat belum ada rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan yang telah disediakan.

5. Cara Menggerakkan dan Memperkuat Partisipasi

Perbaiki kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi. Agar keduanya dapat terwujud, maka program pemerintah harus:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki.
2. Memberikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan respon dan tingkah laku yang positif.

Ndraha (2007:104) menyatakan bahwa partisipasi dapat digerakkan melalui cara:

1. Meningkatkan proyek pembangunan Kelurahan yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
2. Organisasi/lembaga kemasyarakatan yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Sautoy dalam Ndraha (2007:104) menyatakan partisipasi dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan (Kelurahan) atau bukan. Jika masyarakat Kelurahan yang bersangkutan tidak berkesempatan dalam suatu proyek di Kelurahan, berarti proyek tersebut pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan di Kelurahan. Betapa jelasnya bahwa partisipasi masyarakat merupakan syarat utama dalam kehidupan demokrasi di era ini, namun semua itu tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya usaha-usaha.

Menurut Sutoro (2001:32) ada beberapa strategi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

1. Mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi meliputi nilai kebersamaan dan solidaritas, kesadaran kritis serta peka terhadap perubahan.
2. Menghidupkan kembali institusi-institusi *volunterr* sebagai media yang akan menjadi pilar nyata partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, seperti keberadaan Forum Rembug Kelurahan.

3. Memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi masyarakat yang baru berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonomi, profesi, minat, hobbi, politik maupun aspek kultural lainnya.
4. Mengkampanyekan mengenai pentingnya kesadaran inklusif bagi Masyarakat dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi.
5. Memperluas ruang komunikasi publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama. Kelima strategi diatas merupakan jalan penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangun di Kelurahan.

C. Kerangka Pikir

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat perlu adanya seorang pemimpin yang baik dalam hal ini Kepala Kelurahan. Adapun dalam pelaksanaannya tidak mungkin semudah yang dipikirkan, maka dari itu diperlukan penelitian tentang Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat serta Faktor Apa yang Menghambat dan Mendukung Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

(1). Membimbing, gaya ini ditandai dengan komunikasi satu arah. Bersifat instruksi-instruksi yang mengarahkan bawahan secara ketat di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin lebih banyak membimbing bawahannya.

(2). Mengarahkan, gaya ini ditandai dengan komunikasi dua arah dari pemimpin, yaitu memberikan pengarahan. Memberi atau membangun motivasi sehingga para anggota dapat mencurahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selain itu pemimpin juga memberikan sosio emosional agar bawahan turut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan.

(3). Mengikutsertakan, gaya ini ditandai dengan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dalam pengambilan keputusan melalui komunikasi dua arah dan memberikan kemudahan untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas, yaitu menjalin komunikasi yang baik agar tercipta

hubungan yang baik kepada para pengikutnya dan memberikan kemudahan akses informasi penting. Pemimpin selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam setiap aktivitas kerja. Dengan demikian memberikan partisipasi luas kepada masyarakat, maka motivasi masyarakat akan semakin berkembang dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemahaman masyarakat terhadap pembangunan. Sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi untuk mensukseskan pembangunan demi kepentingan bersama.
- b. Tingkat kehadiran masyarakat. Masih rendahnya tingkat kehadiran atau partisipasi masyarakat sehingga menghambat tercapainya tujuan pembangunan di Kelurahan Palleko.
- c. Sosialisasi yang di masih kurang sehingga masyarakat belum memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan yang telah disediakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 07 sampai 30 Juni 2018.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kelurahan Palleko Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar terkait dengan Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian selama penelitian berlangsung.

C. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama tetapi bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive*. Informan penelitian pada tahap awal dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya serta relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Lurah Palleko dan Stafnya serta Tokoh Masyarakat dan Warga di Kelurahan Palleko.

Tabel 01: Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Amiruddin, S.Sos	A.M	Lurah Palleko	1
2.	A. Airin Tenripada B, S.E	A.T	Kasi. Pembangunan	1
3.	Rosmala Katy, S.Sos	R.K	Kasi. Ekonomi dan Kesra	1
4.	Subhan Dg. Tangnga	S.T	Kepala Lingkungan Palleko I	1
5.	Abd. Latif Tulung	L.T	Warga Kelurahan Palleko	1
6.	H. Zainal Abidin	Z.A	Warga Kelurahan Palleko	1
JUMLAH INFORMAN				6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang

tampak pada obyek penelitian. Fokus observasi dilakukan terhadap 3 komponen utama yaitu *space* (ruang), aktor (pelaku), dan aktivitas (kegiatan). Pada penelitian ini dilakukan pengamatan Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

2. Wawancara

Teknik Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam. Pedoman wawancara atau *interview guide* dengan tujuan agar wawancara tidak menyimpang dari permasalahan. Pertanyaan penelitian ditujukan untuk Lurah Palleko dan Stafnya serta Tokoh Masyarakat dan Warga di Kelurahan Palleko. Teknik Wawancara memungkinkan responden atau subyek yang diteliti berhadapan muka secara langsung (*face to face*), kemudian menanyakan sesuatu yang telah direncanakan dalam pedoman wawancara kepada Informan. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian dan kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan observasi. Menggunakan metode dokumentasi bisa melihat dokumen yang sudah ada dalam bentuk arsip atau buku seperti struktur organisasi, sejarah, visi misi Kantor Lurah Palleko dan informasi-informasi tercatat dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan

Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan menfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan gambaran dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Sajian data dalam penelitian ini selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan serta tabel sebagai pendukung narasinya.

Semuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dapat dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten pada saat ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*. Sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari data yang sudah ada atau terkumpul kemudian melakukan pemilihan, penyederhanaan, menggolongkan data dan membuang data yang tidak perlu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan data apa saja yang mau diambil. Setelah itu dilakukan penyajian data dengan cara penyusunan sekumpulan data atau informasi agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya menghubungkan dan membandingkan antara teori yang ada dengan hasil praktek di lapangan kemudian mencari hubungan antara satu komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari

permasalahan yang diteliti di Kantor Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:366), Teknik Pengumpulan Data Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Menurut Sugiyono (2009:368), ada 3 macam Triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih

valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Takalar adalah sebuah [Kabupaten](#) di [Provinsi Sulawesi Selatan](#), [Indonesia](#). Ibu kotanya terletak di Kecamatan [Pattallassang](#).



Kabupaten Takalar terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pattallassang
- 2) Kecamatan Polongbangkeng Selatan
- 3) Kecamatan Polongbangkeng Utara
- 4) Kecamatan Galesong
- 5) Kecamatan Galesong Selatan
- 6) Kecamatan Galesong Utara
- 7) Kecamatan Mappakasunggu
- 8) Kecamatan Manggarabombang
- 9) Kecamatan Sanrobone

Kabupaten ini memiliki Luas Wilayah \pm 566,51 km². Adapun batas-batas Kabupaten Takalar adalah:

- Sebelah Utara dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa

2. Sejarah

Kabupaten Takalar hari jadinya 10 Februari 1960. Sebelumnya Takalar sebagai wilayah *onder afdeling* yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama-sama dengan *onder afdeling* Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene, Kepulauan dan Jeneponto. *Onder afdeling* Takalar membawahi beberapa *district* yaitu: Distrik Polongbangkeng, Distrik Galesong, Distrik Topejawa, Distrik Takalar, Distrik Laikang dan Distrik Sanrobone. Setiap Distrik diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali Distrik Topejawa yang diperintah oleh Kepala Pemerintahan bergelar Lo'mo.

Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi dan Tokoh-tokoh Masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara 3 komponen ini, disepakati 2 pendekatan/cara yang akan ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu:

1. Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar. Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan

sepenuhnya kepada 4 orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Mannan Dg. Liwang.

2. Melalui pengiriman Delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi Tokoh Masyarakat lainnya.

Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957), maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibu Kotanya adalah Jeneponto. Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang sebagai ketua DPRD.

Para Politisi dan Tokoh Masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 Kabupaten yang masing-masing berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.

Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Takalar termasuk didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Pebruari 1960, TERBENTUKLAH KABUPATEN TAKALAR, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H. DONGGENG DG. NGASA (seorang Pamong Praja Senior).

Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai Ibu Kota Kabupaten dan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Pebruari 1960 sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar.

Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu, Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dibantu oleh 4 orang Badan Pemerintahan Harian (BPH), yaitu:

- BPH Tehnik & Keamanan : H. Mappa Dg. Temba
- BPH Keuangan : Bangsawan Dg. Lira
- BPH Pemerintahan : H. Makkaraeng Dg. Manjarungi
- BPH Ekonomi : Bostan Dg. Mamajja

Telah terbentuknya Kabupaten Takalar maka Distrik Polongbangkeng dijadikan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Polongbangkeng Utara, Distrik Galesong dijadikan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan. Distrik Topejawa, Distrik Laikang, Distrik Sanrobone menjadi Kecamatan Totallassa (singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang kemudian berubah menjadi Kecamatan Manggarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu.

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibu Kota). Kemudian Perda Nomor 3 Tahun 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 27 April 2007, 2 Kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara. Sehingga dengan demikian sampai sekarang, Kabupaten Takalar sudah terdiri dari 9 Kecamatan, sebagai mana telah disebutkan terdahulu. Kesembilan Kecamatan ini membawahi sejumlah 83 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk + 250.027 Jiwa.

Sejak terbentuknya Kabupaten Takalar hingga saat ini, pejabat Bupati Kepala Daerah silih berganti, demikian pula Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masing-masing yaitu:

BUPATI KEPALA DAERAH :

1. Donggeng Dg. Ngasa (1960-1965)
2. Makkatang Dg. Sibali (1965-1967)
3. M. Suaib Pasang (1967-1978)
4. Ibrahim Tulle (1978-1983)
5. Batong Aminullah (1983-1987)
6. Drs. H. Tadjuddin Nur (1987-1992)
7. Drs. H. Syahrul Saharuddin, MS (1992-1997)
8. Drs. H. Zainal Abidin, M.Si, (1997-2002)
9. Drs. H. Ibrahim Rewa, MM (2002-2007)
10. Dr. H. Ibrahim Rewa, MM, (2007-2012)
11. Dr. H. Burhanuddin B, SE, M.Si (2012-2017)
12. H. Syamsari, S.Pt., MM (2017-2022)

KETUA DPRD :

1. H. A. Dahlan Dg. Sibali (1966-1970)
2. Ashar Mangung (1970-1971)
3. H. Halollang Adam, BA (1971-1977)
4. Hasbuddin Muntu (1977-1982)
5. H. Abd. Wahab Dg. Ngerang (1982-1987)
6. H. Semming Bennu (1987-1992)
7. Drs. Sirajuddin Lopo (1992-1997)
8. Tjardiman (1997-1999)

9. Drs. H. Ibrahim Rewa, MM (1999-2002)
10. Drs. H. Napsa Baso (2003-2009)
11. Drs. H. Abd. Majid Makkaraeng, MM (2009-2014)
12. H. Djabir Bonto (2014-2019)

3. Keadaan Demografis

Keadaan Demografis merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi yang mempengaruhi stratifikasi dalam masyarakat. Faktor penduduk ini menempati posisi yang paling utama, karena seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan itu adalah suatu upaya manusia untuk merubah pola hidup dan status sosial mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya.

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk sebanyak 250.027 Jiwa (Laki-Laki: 120.663 dan Perempuan: 129.364) yang terbagi dalam 6.531 Kepala Keluarga.

b. Iklim

Iklim yang ada di Kabupaten Takalar bervariasi, dari iklim musim hujan yang terjadi pada rentan bulan Oktober hingga Februari dan sebaliknya musim kemarau yang terjadi pada rentan bulan Februari hingga Oktober. Secara umum curah hujan yang terjadi masuk dalam kategori sedang dan sangat dipengaruhi oleh angin musiman.

4. Potensi Daerah

a) Potensi Wisata

(1) Objek Wisata Perburuan Rusa

Kegiatan Perburuan Rusa merupakan kegiatan langka yang ada di Sulawesi Selatan. Sejak dulu kegiatan berburu rusa di Desa Barugaya dan Ko'mara sudah sering dilakukan oleh para Bangsawan (Karaeng) pada hutan yang luasnya sekitar 2.000 Hektar. Setiap melakukan perburuan rusa, para Karaeng berkumpul di Baruga (Rumah Panggung) dan mempersiapkan perlengkapan berburu seperti pasukan berkuda, kentongan, dll. Dengan melihat kondisi alam yang masih alami seperti pegunungan, danau, dan hutan, maka selain berburu rusa para pengunjung dapat menikmati pemandangan alam, melakukan kegiatan memancing, memanjat tebing, dan berbagai kegiatan lainnya.

(2) Objek Wisata Lapris

Pada tanggal 17 Juli 1946 Ranggong Daeng Romo diangkat sebagai Pucuk Pimpinan Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi (Lapris) yang beranggotakan 19 Organisasi Kelaskaran di Seluruh Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dalam kedudukannya sebagai Panglima Lapris di Desa Bulukunyi yang sekarang dijadikan sebagai Monumen Lapris. Monumen Lapris yang dibangun di sebuah bukit di Desa Bulukunyi sangat cocok dikunjungi oleh peneliti sejarah perjuangan bangsa dan para wisatawan karena pesona alam di sekitar lokasi mendatangkan kesejukan tersendiri bagi pengunjung. Selain itu, sekitar lokasi terdapat mata air yang dijadikan

sebagai tempat permandian yang dikenal dengan nama Permandian Alam Saluka.

(3) Objek Wisata Topejawa

Panjang Garis Pantai di Kabupaten Takalar sekitar 74 Km. Dari panjang garis pantai tersebut, terdapat 3 Obyek Wisata Pesisir di Kabupaten Takalar (Pantai Topejawa, Pantai Galumbaya dan Pantai Ujung Kassi). Permandian Alam Topejawa yang panjangnya sekitar 800 meter banyak dikunjungi karena suasana berenang di laut yang menyenangkan dan panorama alamnya yang memukau.

Selain pemanfaatan sarana wisata pada lokasi permandian alam seperti balai-balai, baruga (rumah panggung), pelelangan ikan serta berbagai fasilitas lainnya. Pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas pantai seperti berenang, berjemur, olahraga pantai, membakar ikan segar, berlayar dengan perahu tradisional (balolang), dan aktivitas pantai lainnya.

(4) Objek Wisata Pulau Sanrobengi

Sanrobengi adalah Pulau kecil yang memiliki potensi sebagai pusat kunjungan karena selain berpasir putih juga dapat dilakukan kegiatan-kegiatan laut seperti berenang, menyelam, berjemur, memancing, membakar ikan segar, dan berbagai kegiatan laut lainnya. Selain kegiatan laut, Pulau Sanrobengi ditunjang oleh sarana pendukung TPI yang terletak di Desa Boddia dan dermaga lainnya.

(5) Objek Wisata Terumbu Karang Pulau Tanakeke

Kepulauan Tanakeke terdiri atas Pulau Tanakeke, Bauluang, Satanga, dan Dayang-dayangan menyimpan perpaduan objek wisata alam yaitu agrowisata, berburu/atraksi menangkap ikan, pantai dan menyelam. Pulau-pulau tersebut menyimpan keanekaragaman hayati yang unik, yaitu Ikan Baronang, Biawasa, Kepiting Dato yang ukuran cangkangnya bisa mencapai 25 cm. Hutan Bakau, Padang Lamun yang tumbuh di pasir putih cocok untuk permandian alam jemur sambil menikmati hidangan khas bakar ikan laut dan terumbu karangnya yang asri cocok untuk penyelam.

(6) Objek Wisata Benteng Sanrobone

Pembuatan tembok dan dinding Benteng Sanrobone dilakukan oleh Dampang Panca Belong (Raja I Kerajaan Sanrobone) atas perintah Raja Gowa dan dikerjakan oleh rakyat secara gotong royong sekitar abad XVI. Benteng Sanrobone terbuat dari batu bata dan berbentuk perahu dengan panjang sekitar 3,7 km. Benteng tersebut mempunyai 7 pintu benteng yaitu 4 pintu besar searah dengan mata angin dan 3 pintu kecil. Beberapa bukit sejarah diantaranya, Meriam dengan berat sekitar 150 kg, Keris Pusaka dan Makam Raja Sanrobone (Kobbanga). Benteng ini menarik dikunjungi karena bernilai sejarah masa lalu mengenai keberadaan dan perjuangan Kerajaan Sanrobone di Sulawesi Selatan.

b) Potensi Media

(1) Media Televisi

Kabupaten Takalar memiliki rencana membangun stasiun televisi tersendiri, di antaranya:

- a. [Tarumanegara TV](#) (21 UHF)
- b. [Nusantara TV](#) (jaringan [MTV](#))
- c. [Khatulistiwa TV](#) (jaringan [Sindo TV](#))

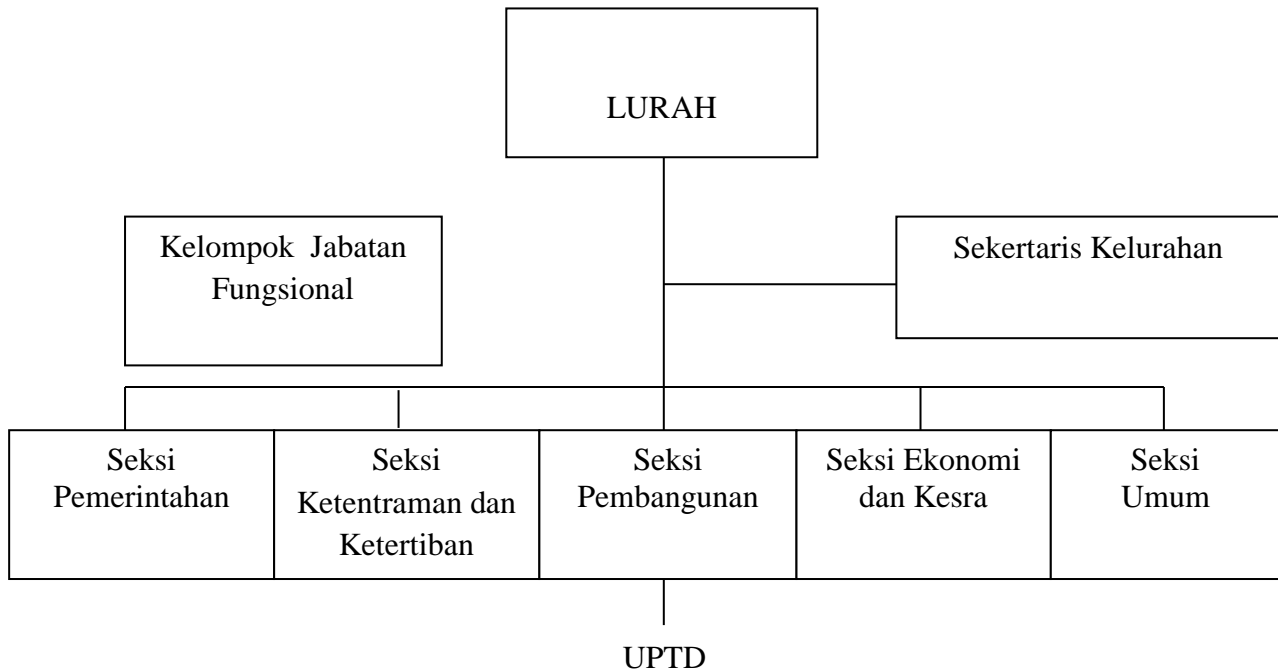
(2) Media Radio

Selain Media Televisi, Kabupaten Takalar juga memiliki Media Radio, yaitu Radio Harmoni FM - 97,0 MHz.

Kepemimpinan Kepala Kelurahan merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seorang Kepala Kelurahan juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan kelurahan semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring agar tercipta suasana yang kondusif dan harmonis sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan kelurahan semakin baik akan bisa terwujud.

Kepemimpinan Kepala Kelurahan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan karena segala keputusan ada di tangan Kepala Kelurahan itu sendiri. Oleh sebab itu Kepala Kelurahan sangat berperan penting di masyarakat Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Struktur Organisasi Kantor Lurah Palleko



5. Tugas dan Fungsi

- a. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kelurahan. Lurah mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Kecamatan.
 - b) Pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
- b. Sekertaris Kelurahan merupakan unsur kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. Sekertaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

Sekretaris kelurahan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan di Kelurahan.
 - b) Urusan administrasi keuangan.
 - c) Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- c. Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kelurahan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan secara umum. Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kelurahan.
 - b) Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan.
 - c) Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- d. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:
- a) Pengumpulan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat kelurahan.
 - b) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program pemberdayaan masyarakat.
- e. Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
- a) Perencanaan dan pelaksanaan akan pembangunan di lingkup kelurahannya.

b) Pengawasan dan Pemerhatian terhadap apa yang telah dibangun bersama.

f. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa bidang sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas: Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

B. Kepemimpinan Kepala Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Silambi (2014:728) yang mengemukakan bahwa bahwa ada 3 Gaya Dasar dari Kepemimpinan, yakni;

(1). Membimbing, gaya ini ditandai dengan komunikasi satu arah. Bersifat instruksi-instruksi yang mengarahkan bawahan secara ketat di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin lebih banyak membimbing bawahannya.

(2). Mengarahkan, gaya ini ditandai dengan komunikasi dua arah dari pemimpin, yaitu memberikan pengarahan. Memberi atau membangun motivasi sehingga para anggota dapat mencurahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selain itu

pemimpin juga memberikan sosio-emosional agar bawahan turut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan.

(3). Mengikutsertakan, gaya ini ditandai dengan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dalam pengambilan keputusan melalui komunikasi dua arah dan memberikan kemudahan untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas, yaitu menjalin komunikasi yang baik agar tercipta hubungan yang baik kepada para pengikutnya dan memberikan kemudahan akses informasi penting. Pemimpin selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam setiap aktivitas kerja. Dengan demikian memberikan partisipasi luas kepada masyarakat, maka motivasi masyarakat akan semakin berkembang dengan baik.

Adapun masing-masing jawaban informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membimbing Masyarakat

Membimbing, gaya ini ditandai dengan komunikasi satu arah. Bersifat intruksi-intruksi yang mengarahkan bawahan secara ketat di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin lebih banyak membimbing bawahannya. Artinya memberikan bimbingan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala tugas yang diembannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Bapak Lurah Palleko terkait pemberian bimbingan kepada masyarakat.

Beliau mengatakan bahwa:

“...Saya sebagai Lurah selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada RT/RW atau tokoh masyarakat agar sekiranya jika ada pembangunan infrastruktur jalan atau ada program kebijakan pemerintah lainnya yang bersifat kegototong royongan, maka diharapkan partisipasi dari masyarakat palleko untuk hadir disetiap pertemuan atau musrembang agar setiap masyarakat bisa mengetahui langsung informasi dari pemerintah sehingga saat ada kesulitan mereka tidak perlu lagi kebingungan bertanya kesana-kemari”. (Wawancara dengan A.M, Jumat 22 Juni 2018).

Hal senada juga disampaikan Kasi. Pembangunan yang mengatakan bahwa:

“...Masih adanya masyarakat di Kelurahan Palleko yang belum sadar akan pentingnya menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang sudah ada, dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan masih tergolong rendah”. (Wawancara dengan A.T, Jumat 22 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Palleko maka dapat disimpulkan bahwa Kepeimpinan seorang Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan (gotong-royong) di Kelurahan Palleko sudah menjalankan perannya dengan baik dengan cara menyampaikan himbuan pelaksanaan gotong-royong itu sendiri pada saat adanya rapat atau pertemuan, namun dalam hal gotong-royong masih perlu ditingkatkan lagi, mengingat masyarakat setempat masih belum sepenuhnya aktif akan berbagai kegiatan tersebut dikarenakan adanya kesibukan masing-masing. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap pembangunan diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik antar pihak pemerintah dan masyarakat setempat, karena kesadaran masyarakat tidak akan bisa muncul dengan sendirinya, diperlukam adanya dorongan atau motivasi dari Pemerintah Kelurahan.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Kasi.

Ekonomi dan Kesra terkait hal yang sama, Beliau mengatakan bahwa:

“...Lurah maupun aparat pemerintah lainnya memiliki cara tertentu untuk membimbing masyarakatnya agar terarah dan terhindar dari kesimpangsiuran dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diembanya, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Lurah harus mampu terampil dalam mengurus orang lain, memiliki kepekaan inisiatif dan mempunyai persepsi positif serta jalan keluar dari setiap masalah, agar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut dapat berjalan atau terlaksana dengan baik. Membimbing bawahan dalam bentuk instruksi-instruksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan selaku Lurah harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya”. (Wawancara dengan R.K, Jumat 22 Juni 2018).

Berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Lurah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilihat dari indikator membimbing masyarakat dalam program pembangunan telah berjalan dengan baik karena Lurah mampu mempengaruhi masyarakat untuk melakukan apa yang dinginkannya untuk pencapaian tujuan bersama.

Hal lain disampaikan oleh salah satu Kepala Lingkungan di Kelurahan Palleko yang mengatakan bahwa:

“...Sebagai Kepala Lingkungan disini, saya selalu memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat disini agar sekiranya mau menghadiri rapat atau musrembang yang diadakan oleh pemerintah setempat agar bisa menyampaikan langsung aspirasinya kepada Lurah Palleko”. (Wawancara dengan S.T, Jumat 22 Juni 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Musrembang Kelurahan. Palleko Lurah sebagai pimpinan telah menjalankankan perannya yaitu mengadakan

Musrembang dan menampung aspirasi dari masyarakat. Pada pelaksanaan Musrembang di Kelurahan Palleko, para Ketua RT yang menjadi wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di tiap lingkungan sekitarnya masing-masing. Yang kemudian nantinya akan dirundingkan bersama-sama oleh pihak Kelurahan untuk membicarakan yang manakah persoalan yang paling penting untuk dibahas kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk direalisasikan. Dari beberapa hasil lainnya dalam pelaksanaan rapat/pertemuan pihak Kelurahan melibatkan Ketua RT/tokoh masyarakat sebagai bentuk keterwakilan masyarakat dalam berpartisipasi. Adanya ketidakpastian dalam hal merealisasikan usulan dari beberapa masyarakat kemudian dikarenakan kesibukan masing-masing dari masyarakatlah yang dianggap sebagai faktor penyebab tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Palleko yang mengatakan bahwa:

“...Karena faktor kesibukan terkadang masyarakat malas atau tidak bisa menghadiri rapat yang diadakan di kelurahan. Rata-rata pekerjaan masyarakat disini adalah petani dan juga penjual jadi otomatis mereka sibuk”. (Wawancara dengan L.T, Jumat 22 Juni 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat Palleko lainnya yang mengatakan bahwa:

“...Akibat kesibukan sebagian masyarakat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan. Hanya sebagian masyarakat saja yang datang ke kantor Kelurahan untuk menghadiri/mengikuti rapat/pertemuan”. (Wawancara dengan Z.A, Jumat 22 Juni 2018).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Palleko dikarenakan faktor kesibukan terkadang masyarakat malas menghadiri rapat kelurahan. Rata-rata pekerjaan masyarakatnya adalah petani dan juga penjual jadi otomatis mereka sibuk. Sebaiknya Kepala Kelurahan dapat menyesuaikan waktu ketika harus memberikan bimbingan, pengarahan dan mengikutsertakan masyarakat karena pekerjaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga dengan ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara menyeluruh dan tercipta hubungan yang baik serta pembangunan di Kelurahan dapat terlaksana secara maksimal.

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Silambi (2014:728) terkait Gaya Kepemimpinan yang mengemukakan bahwa Gaya Dasar dari Kepemimpinan, yakni Membimbing. Gaya ini ditandai dengan komunikasi satu arah. Bersifat instruksi-instruksi yang mengarahkan bawahan secara ketat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Pemimpin lebih banyak membimbing bawahannya. Jika disimpulkan bahwa Teori Hersey dan Blanchard dalam Silambi (2014:728) sudah betul diterapkan dalam Gaya Kepemimpinan Kepala Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar demi meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam membimbing masyarakat, Lurah memberikan instruksi-instruksi kepada masyarakat seperti bagaimana mekanisme dilapangan dan apa saja yang dibutuhkan

dalam hal pembangunan, sehingga tugas dan fungsi Pemerintah Kelurahan dapat terlaksana dengan baik.

2. Mengarahkan Masyarakat

Mengarahkan, gaya ini ditandai dengan komunikasi dua arah dari pemimpin, yaitu memberikan pengarahan. Memberi atau membangun motivasi sehingga para anggota dapat mencurahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, selain itu pemimpin juga memberikan sosioemosional agar bawahan turut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan. Artinya memberikan arahan kepada masyarakat dengan memberikan motivasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lurah Palleko terkait mengarahkan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“...Pemberian motivasi sangat perlu dilakukan demi meningkatkan partisipasi masyarakat Palleko. Bila perlu seorang lurah harus turun langsung ke lapangan jika ada pekerjaan seperti perbaikan jalan, pembuatan drainase dan lain sebagainya. Itu semua perlu dilakukan guna memberikan contoh seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Lurah juga memberikan arahan kepada masyarakatnya agar bisa menjaga dan memelihara pembangunan kelurahannya seperti jalan yang telah dibangun agar bisa digunakan secara maksimal”. (Wawancara dengan A.M, Jumat 22 Juni 2018).

Peranan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya motivator atau unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Sebagai pimpinan dalam peyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan Palleko

tentunya memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya menjalankan perannya sebagai pimpinan yang memotivasi atau menggerakkan agar partisipasi masyarakat di Kelurahan Palleko dapat meningkat.

Pernyataan diperkuat Kasi. Pembangunan yang mengatakan bahwa:

“...Kalau Lurahnya makan, masyarakat juga harus makan. Artinya Lurah itu berbaur sama masyarakat biar bisa dikatakan dia seorang Lurah, sama-sama seperti masyarakat lainnya tidak ada bedanya. Jika harus memberikan motivasi memang harus seperti itu harus ikut berbaur”. (Wawancara dengan A.T , Jumat 22 Juni 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang seperti ini yang diinginkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena selaku Lurah hal itu selalu menjadi kewajiban untuk memberikan motivasi dan sosio-emosional kepada masyarakatnya agar kegiatan berpartisipasi ini tidak hilang. Dengan adanya motivasi dan sosio-emosional ini sangat membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan baik dan ini akan mendorong rasa kebersamaan dan akan tumbuh ikatan emosional untuk mewujudkan kerjasama antara Lurah dengan Masyarakat.

Hal lain disampaikan oleh salah satu Kepala Lingkungan di Kelurahan Palleko yang mengatakan bahwa:

“...Sebagai Lurah memang harus memberikan motivasi serta mengarahkan masyarakatnya di setiap pembangunan **kelurahannya**. Salah

satu contohnya waktu pas kita lagi bangun jalan, pak lurah ikut hadir, bahkan ikut membantu masyarakat. Kalau belum selesai ini bangunan jalannya pak lurah tidak mau pulang sampai bangunan jalannya beres, pak lurah menunggu sampai maghrib meskipun turun hujan”. (Wawancara dengan S.T, Jumat 22 Juni 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat Palleko yang mengatakan bahwa:

“...Pak lurah orangnya terbuka siapa saja yang mau kasih masukan dan saran ke pak lurah langsung bisa hubungi melalui kontak telepon/hpnya ada sama pak RT dan Babinsa. Atau bisa juga langsung berkunjung ke rumahnya, 24 jam pintunya terbuka untuk masyarakat”. (Wawancara dengan L.T Jumat 22 Juni 2018).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cara mengarahkan masyarakat itu berbeda-beda. Dengan memberikan motivasi dan sosio-emosional kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini agar setiap masyarakat dapat mencurahkan sumber daya yang dimilikinya serta turut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini lebih baik lagi. Lurah juga berperan dalam pembangunan kelurahan, Bukan hanya pembangunan fisik saja tetapi juga berperan dalam pembangunan mental masyarakat kelurahan. Lurah menjadi tempat bertanya dan bernaung dalam segala kepentingan masyarakat kelurahan dan juga mengkoordinasikan lembaga-lembaga kelurahan. Di dalam memberikan motivasi dan sosio-emosional kepada masyarakat Lurah tidak sendiri tetapi Kepala Lingkungan, RT/RW bahkan tokoh masyarakatnya juga memberikan motivasi kepada masyarakat. Dengan memberikan motivasi dan sosio-emosional kepada masyarakat yang dimana masyarakat akan merasa

diperhatikan dan ini akan membangun atau mendorong semangat jiwa masyarakat untuk turut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan pembangunan terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Silambi (2014 : 728) dalam teori gaya kepemimpinan yang mengarahkan, gaya ini ditandai dengan komunikasi dua arah dari pemimpin, yaitu memberikan pengarahan. Memberi atau membangun motivasi sehingga para anggota dapat mencurahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, selain itu pemimpin juga memberikan sosio-emosional agar bawahan turut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan. Berdasarkan teori Silambi (2014 : 728), maka dapat disimpulkan bahwa sudah ada bentuk arahan yang diberikan oleh Lurah Palleko. Akan tetapi peran Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan, Lurah sudah menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pengarahan agar masyarakat menjaga dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kelurahan Palleko dengan baik, tetapi dari hasil pembangunan yang ada seperti jalan, masih ditemui jalan yang rusak akibat dari material yang digunakan untuk perbaikan jalan masih seadanya saja karena merupakan hasil swadaya masyarakat bukan bantuan dari pemerintah. Lurah juga sudah berupaya untuk memotivasi dan melibatkan masyarakat secara menyeluruh tetapi partisipasi dari masyarakat sendiri yang masih rendah dikarenakan kesibukan masing-masing dan juga karena usulan yang sudah diajukan seperti jika ada perbaikan jalan tidak

mendapat tanggapan dari pemerintah lah yang menjadi faktor partisipasi masyarakat masih kurang aktif.

3. Mengikutsertakan Masyarakat

Mengikutsertakan, gaya ini ditandai dengan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dalam pengambilan keputusan melalui komunikasi dua arah dan memberikan kemudahan untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas, yaitu menjalin komunikasi yang baik agar tercipta hubungan yang baik kepada para pengikutnya dan memberikan kemudahan akses informasi penting. Pemimpin selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam setiap aktivitas kerja. Dengan demikian memberikan partisipasi luas kepada masyarakat, maka motivasi masyarakat akan semakin berkembang dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lurah Palleko terkait mengarahkan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“...Dalam bekerjasama dengan masyarakat Kelurahan Palleko, saya mencoba melakukan komunikasi yang baik melalui pertemuan atau rapat guna menjalin kerjasama yang baik sehingga tercipta kesepakatan bersama”. (Wawancara dengan A.M, Jumat 22 Juni 2018).

Pernyataan lain diperkuat oleh Kasi. Ekonomi dan Kesra yang mengatakan bahwa:

“...Mengikutsertakan masyarakat sangat diperlukan dalam setiap pembangunan kelurahan dengan cara mengadakan rapat atau pertemuan lainnya. namun dalam hal gotong-royong masih perlu ditingkatkan lagi, mengingat masyarakat setempat masih belum sepenuhnya aktif akan berbagai kegiatan tersebut karena kesibukan masing-masing. Keikutsertaan masyarakat dalam gotong-royong untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan perlunya kerjasama yang kompak antar pihak pemerintah dan masyarakat setempat, karena kesadaran masyarakat tidak

bisa muncul dengan sendirinya diperlukan adanya dorongan atau motivasi”. (Wawancara dengan R.K, Jumat 22 Juni 2018).

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi. Pembangunan terkait hal yang sama mengatakan bahwa:

“...Partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk kegiatan pembangunan berwujud tenaga, uang atau material masyarakat sudah sangat menyadari hal tersebut sehingga masyarakat tingkat partisipasinya atau keikutsertaannya cukup baik dalam berkontribusi. Tetapi masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga mereka tidak aktif dalam berpartisipasi. Kendala yang dihadapi ialah minimnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat sehingga baik Lurah maupun masyarakat sendiri harus menggalang dana dari swadaya masyarakat agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebaiknya juga tidak hanya terbentuk dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk ikut serta melibatkan diri dalam setiap kegiatan pembangunan, melainkan kerjasama antar keduanya yakni pemerintah dan masyarakat agar dapat terealisasinya pembangunan yang diinginkan bersama. (Wawancara dengan A.T, Jumat 22 Juni 2018).

Hal lain disampaikan oleh salah satu Kepala Kelurahan di Kelurahan Palleko yang mengatakan bahwa:

“...Hanya sebagian masyarakat saja yang mau berpartisipasi dalam hal pemberian tenaga, uang ataupun material. Hal ini diakibatkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Palleko yang mau ikut berpartisipasi. Selain itu sebagian besar mayoritas pekerjaan masyarakat Palleko adalah bertani sehingga membuat sebagian masyarakat sibuk dengan urusannya masing-masing”. (Wawancara dengan S.T, Jumat 22 Juni 2018).

Dari hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa Lurah bekerjasama dengan masyarakat dalam bentuk pelaksanaan partisipasi dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk kegiatan pembangunan berwujud tenaga, uang atau material masyarakat sudah sangat menyadari hal tersebut sehingga

masyarakat tingkat partisipasinya atau keikutsertaannya cukup baik dalam berkontribusi. Tetapi masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga mereka tidak aktif dalam berpartisipasi.

Kendala yang dihadapi ialah minimnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat sehingga baik Lurah maupun masyarakat sendiri harus menggalang dana dari swadaya masyarakat agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebaiknya juga terbentuk dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk ikut serta melibatkan diri dalam setiap kegiatan pembangunan, melainkan kerjasama antar keduanya yakni pemerintah dan masyarakat agar dapat terealisasinya pembangunan yang diinginkan bersama.

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Silambi (2014 : 728) dalam teori gaya kepemimpinan yang mengikutsertakan, gaya ini ditandai dengan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dalam pengambilan keputusan melalui komunikasi dua arah dan memberikan kemudahan untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas, yaitu menjalin komunikasi yang baik agar tercipta hubungan yang baik kepada para pengikutnya dan memberikan kemudahan akses informasi penting. Pemimpin selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam setiap aktivitas kerja. Dengan demikian memberikan partisipasi luas kepada masyarakat, maka motivasi masyarakat akan semakin berkembang dengan baik.

Berdasarkan teori Silambi (2014 : 728) dalam teori gaya kepemimpinan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam setiap

pembangunan di kelurahannya maka sudah sangat betul diterapkan, akan tetapi tidak semua masyarakat yang bisa ikutserta serta masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga mereka tidak aktif dalam berpartisipasi.

C. Kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Kepemimpinan Kepala Lurah merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seorang kepala Lurah juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan kelurahan semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang kondusif dan harmonis sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan kelurahan semakin baik akan bisa terwujud.

Kepemimpinan Kepala Kelurahan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan karena segala keputusan ada di tangan Kepala Kelurahan itu sendiri. Oleh sebab itu Kepala Kelurahan sangat berperan penting di masyarakat Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang meliputi tugas umum pemerintah secara garis besar. Dan untuk menjalankan tugas dan fungsi seorang Kepala Kelurahan tidaklah mudah untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakatnya ada beberapa kendala yang harus dihadapinya yaitu:

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lurah Palleko terkait pemahaman masyarakat tentang pembangunan yang mengatakan bahwa:

“...Tingkat Pemahaman masyarakat Palleko masih sangat kurang, masih adanya masyarakat di Kelurahan Palleko yang belum sadar akan pentingnya menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang sudah ada, dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya terlibat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini yang membuat partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan masih tergolong rendah. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif”. (Wawancara dengan A.M, Jumat 22 Juni 2018).

Pertama, adalah pemahaman masyarakat terhadap pembangunan. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap pembangunan, maka bisa dipastikan masyarakat tersebut juga akan aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di lingkungan sekitarnya, namun berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman masyarakat tentang pembangunan masih terlihat kurangnya masyarakat dalam memahami hal tersebut sehingga partisipasinya masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Tingkat Kehadiran Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Seksi Pembangunan terkait tingkat kehadiran masyarakat yang mengatakan bahwa:

“...Peran Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan lagi mengingat partisipasi masyarakatnya yang belum sepenuhnya aktif dengan cara turun atau berhadapan langsung memberikan motivasi kepada

masyarakat agar bersedia hadir di setiap rapat Kelurahan atau setiap ada pembangunan kelurahan seperti ada perbaikan jalan, pembuatan drainase, pembangunan pos kamling dan lain-lain sebagainya”. (Wawancara dengan A.T, Jumat 22 Juni 2018).

Kedua, adalah tingkat kehadiran masyarakat. Apabila tingkat kehadiran atau partisipasi dari masyarakat tersebut tinggi maka tujuan dari pembangunan yang diinginkan akan terlaksana, mengingat pembangunan bukan hanya kepentingan dari sekelompok orang saja melainkan untuk seluruh masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian di wilayah Kelurahan Palleko masyarakat tidak sepenuhnya dapat berpartisipasi dikarenakan kesibukan masing-masing dalam bekerja ataupun hal lainnya.

3. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu Kepala Lingkungan di Kelurahan Palleko terkait kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan yang mengatakan bahwa:

“...Pada pelaksanaan rapat/pertemuan di Kantor Kelurahan Palleko, para Ketua RT yang menjadi wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di tiap lingkungan sekitarnya masing-masing. Yang kemudian nantinya akan dirundingkan bersama-sama oleh pihak Kelurahan untuk membicarakan yang manakah persoalan yang paling penting untuk dibahas kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk direalisasikan. Dari beberapa hasil lainnya dalam rapat/pertemuan pihak Kelurahan melibatkan Ketua RT/Tokoh masyarakat sebagai bentuk keterwakilan masyarakat dalam berpartisipasi.” (Wawancara dengan S.T, Jumat 22 Juni 2018).

Pernyataan lain disampaikan oleh masyarakat Palleko yang mengatakan bahwa:

“...Sebagai masyarakat disini saya tidak pernah ikut rapat/pertemuan dikantor Kelurahan karena hanya membuang waktu saja. Setiap ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau pendapatnya mengenai

kapan pemerintah akan memperbaiki jalanan yang rusak dan berlubang agar tidak terjadi kecelakaan lagi, pihak kelurahan hanya mengatakan sabar segera usulan anda akan di sampaikan ke pemerintah daerah”. (Wawancara dengan Z.A, Jumat 22 Juni 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat Palleko lainnya yang mengatakan bahwa:

“....Setiap ada pertemuan di kantor lurah hanya ketua RT/RW saja yang mewakili masyarakat disini. Kadang juga ada beberapa masyarakat yang ikut hadir di pertemuan dengan tujuan ingin menyampaikan langsung aspirasinya kepada Lurah Palleko terkait pembangunan di kelurahan mereka”. (Wawancara dengan L.T, Jumat 22 Juni 2018).

Ketiga, adalah kurangnya sosialisasi dari pihak Kelurahan terhadap masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan masyarakat di wilayah Kelurahan Palleko yang berbeda-beda tentunya akan berbeda pula pola pikir tentang pembangunan yang ada. Inilah sebabnya mengapa sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung itu penting, baik dari pihak kelurahan secara langsung maupun melalui ketua RT. Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan yang ada sehingga masyarakat kurang terlibat di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

A. Kepemimpinan Kepala Kelurahan

1. Dalam membimbing masyarakat, Kepala Kelurahan memberikan instruksi-instruksi kepada masyarakat seperti bagaimana mekanisme di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan dalam hal pembangunan, sehingga tugas dan fungsi Kepala Kelurahan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dilakukan guna menggerakkan masyarakatnya agar bersedia ikut berpartisipasi.
2. Kepala Kelurahan juga sudah berupaya untuk mengarahkan dan memotivasi masyarakat secara menyeluruh tetapi partisipasi dari masyarakat sendiri yang masih rendah dikarenakan kesibukan masing-masing dan juga karena usulan yang sudah diajukan seperti perbaikan jalan tidak mendapat tanggapan dari pemerintahlah yang menjadi faktor partisipasi masyarakat masih kurang aktif.
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam hal pembangunan melalui komunikasi yang baik dengan pertemuan atau rapat guna menjalin kerjasama yang baik sehingga tercipta kesepakatan bersama antara Pemerintah kelurahan dengan Masyarakatnya.

B. Kendala dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yaitu:

1. Pemahaman masyarakat terhadap pembangunan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi untuk mensukseskan pembangunan demi kepentingan bersama.
2. Tingkat kehadiran masyarakat. Masih rendahnya tingkat kehadiran atau partisipasi masyarakat sehingga menghambat tercapainya tujuan pembangunan di Kelurahan Palleko.
3. Sosialisasi yang dianggap masih kurang sehingga masyarakat belum memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan yang telah disediakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepemimpinan Kepala Kelurahan Palleko dalam membimbing masyarakatnya melalui pemberian instruksi-instruksi sebaiknya dilakukan dengan memberikan contoh, seperti terjun langsung ke lapangan melakukan kegiatan pembangunan tersebut agar masyarakat dapat menjadikan seorang pemimpin yang dibanggakan.
2. Kepemimpinan Kepala Kelurahan Palleko dalam mengarahkan masyarakat melalui pemberian motivasi sebaiknya perlu adanya koordinasi antara Kepala Kelurahan dengan Masyarakat yang dilakukan

secara rutin agar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Kepemimpinan Kepala Kelurahan Palleko dalam mengikutsertakan masyarakat dalam hal pembangunan harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat memiliki rasa memiliki tanggung jawab dari pembangunan yang sudah ada.
4. Sebaiknya Kepala Kelurahan Palleko dapat menyesuaikan waktu ketika harus memberikan bimbingan, pengarahan dan mengikutsertakan masyarakat dilihat dari sibuknya pekerjaan masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara menyeluruh sehingga tercipta hubungan yang baik dan pembangunan di Kelurahan dapat terlaksanakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Raharjo, Adisamita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*.
Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial : Sketsa Teori Dan Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tirta Wacana.
- Sutoro, Eko. 2001. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*.
Riau: Seminar Internasional Kedua.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Heidjrachman. 2002. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta : BPFE.
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kumartono, Wahyudi. 1992. *Etika Admistrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*.
Jakarta : Yayasan Karya Dharma.
- Rasyid M, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan Mutiara*. Jakarta : Sumber Widya.
- Rivai, Veithzal dan Basri. 2011. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Mmenilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbens dan Coulter. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi 5.
Jakarta : Erlangga.
- Salusu. 2006. *Pengembalian Keputusan Strategi*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.
Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan23.
Bandung : Alfabeta.
- Loekman, Sutrisno. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*.
Yogyakarta : Kanisius.

Syafie, Inu Kencana. 2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*.

Bandung : PT. Refika Aditama.

Tjihardi, Semuil. 2012 . *To Be a Great Leader*. Edisi 3. Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005, *Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan*.

Wahjono, Sentot Imam. 2010. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Skripsi–Jurnal

Halimatus Sya'diyah. 2018. Peran Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, Volume 6, Nomor 1, 2018 : 7145-7157
ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2018

Melvani, Fresilia Nanda. 2011. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Efektivitas Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah*. Sumatera Selatan. Tesis.

Monica, Silambi. 2014. *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. *eJournal Ilmu Pemerintahan* , 2014, 2 (2): 2716-2728
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2014.